

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tingginya arus Urbanisasi pada wilayah perkotaan berdampak pada tingginya jumlah penduduk, menjadikan semakin banyak barang yang dikonsumsi berakibat pada tingginya timbulan sampah. Peningkatan jumlah volume sampah memicu permasalahan lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan seperti bencana alam (banjir), pencemaran air, udara, dan tanah juga masalah kesehatan yang ditimbulkan. Adapun pembakaran secara tradisional seperti pembakaran sampah tidak dapat mengatasi tingginya angka timbulan sampah, dan pembakaran secara terus menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan saluran pernapasan, gangguan hormonal, penyakit kanker, dan gangguan kesehatan lainnya yang dipicu karena adanya gas beracun yang dapat dihasilkan dari proses pembakaran sampah. Di lain sisi pembakaran memicu adanya praktek pembuangan sampah secara sembarang tanpa mengikuti ketentuan teknis lokasi yang ditentukan. Berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dilakukan upaya dalam mengurangi Timbunan sampah, diantaranya hanya dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang dijelaskan di dalam UU maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Hal tersebut hanya berfokus pada pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang semakin menambah angka timbulan sampah pada TPA, yang berakibat pada *overload* nya TPA.

Kabupaten Bekasi merupakan wilayah Nodal Jabodetabek. Wilayah Nodal adalah wilayah yang memiliki beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan secara fungsional, dimana Jakarta sebagai Pusat dan Ibu kota negara, dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai wilayah pendukung. Kabupaten Bekasi memiliki jumlah penduduk yang tinggi mencapai 3,21 juta jiwa dengan laju mencapai 1,64 persen berdasarkan kurun waktu 2010-2020, dan menduduki peringkat kedua dalam jumlah penduduk di wilayah Nodal Jabodetabek setelah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 5,56 juta jiwa. Hal tersebut didorong oleh perkembangan Kabupaten Bekasi yang di arahkan sebagai Industri,

permukiman skala besar, perdagangan dan jasa, serta Pariwisata, aktivitas tersebut menghasilkan angka timbulan sampah cukup tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), produksi sampah di Kabupaten Bekasi setiap hari mencapai 2.250,35 ton/hari. Sebagai upaya dalam mengatasi masalah penanganan sampah, pemerintah kabupaten Bekasi memformulasikan beberapa rencana dalam mengatasi timbulan sampah yang semakin menumpuk, salah satunya dengan adanya satu Bank Sampah yang ber-operasional pada setiap Rukun Warga (RW) (Arahan Dinas Lingkungan Hidup 2024) dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di setiap kecamatan dan desa sebagai upaya dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Bekasikab.go.id, 2022). Hal tersebut sesuai dengan fokus kabupaten dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi yaitu Peningkatan Tata Kelola Sampah di Kabupaten Bekasi (Bekasikab.go.id, 2023). Kabupaten Bekasi memiliki 171 Bank Sampah dan 14 TPS 3R dari total 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Dimana Bank sampah dan TPS 3R tersebut merupakan program Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait, dan berdasarkan usulan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai upaya dalam mengatasi persampahan yang semakin meningkat di Kabupaten Bekasi (Data Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup, 2023).

Pada kenyataannya, keberadaan Bank Sampah dan TPS 3R belum dapat di manfaatkan secara maksimal dalam mengurangi sampah. Dimana keadaan Bank Sampah dan TPS 3R hanya berupa bangunan kosong yang terbengkalai padahal kelengkapan operasional sudah memenuhi standar. Tidak maksimal nya program Bank Sampah dan TPS 3R pada umumnya disebabkan oleh pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Selain itu kurangnya peranan para *Stakeholder* juga di anggap sebagai faktor pendukung dalam operasional Bank Sampah dan TPS 3R di samping pengelolaan. Dimana peran *Stakeholder* dianggap penting untuk keberlanjutan program Bank Sampah dan TPS 3R. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah wajib berperan dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan persampahan merupakan permasalahan yang kompleks dan dinamis, kompleks karena melibatkan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan dinamis karena produksi sampah akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Kenyataan ini menyebabkan penanganan sampah tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknis (mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan di TPA), tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Pengelolaan sampah pada dasarnya melibatkan *Stakeholders*. Dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R, *Stakeholder* terdiri dari masyarakat penghasil sampah, pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masing-masing *Stakeholder* tersebut memiliki peran dalam pengelolaan persampahan (Damhuri dan Padmi, 2010:25) dalam (Puspasari & Mussadun, 2017).

Menurut Tri Kharisma (2013) dalam pengelolaan sampah Lingkungan Permukiman, pemerintah sebagai salah satu *Stakeholder* memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah, baik sebagai *regulator* dan *service provider*. Baik dalam penerbitan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan sampah, rencana strategi, serta program yang di usulkan dalam pengelolaan sampah mulai dari kegiatan pelayanan dari pengelolaan persampahan, lokasi yang dapat dijangkau pelayanan persampahan, hingga pelaku atau aktor dalam pengelolaan sampah. Tenten Tedjaningsih, dkk (2018) mengemukakan apabila peran tersebut belum optimal akan memberikan dampak pada program yang akan terhambat, sedangkan keberhasilan pengelolaan sampah yang baik dianggap sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan persampahan 3R terdapat peran *Stakeholder* dalam pengelolaannya. Salah satunya adalah pemerintah, peran pemerintah bukan hanya sekedar *regulator* dan *service provider*, tetapi mencakup beberapa hal lainnya seperti membentuk alur koordinasi antar *Stakeholder* lainnya, pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai pengelola dan berkontribusi melalui penyuluhan, penyedia sarana produksi, penyediaan pasar melalui mitra dalam menjual hasil produk Bank Sampah dan TPS 3R yang dihasilkan, dan pengawasan pengelolaan persampahan berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan *Stakeholder* memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan persampahan dan termasuk salah satu aspek penting dalam

mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang optimal. Berdasarkan uraian permasalahan, maka penelitian ini akan mengkaji “**Identifikasi Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah 3R di Kabupaten Bekasi**”. Guna terciptanya pengelolaan persampahan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang dapat menciptakan manfaat sampah yang dapat berdayaguna.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup, angka timbulan sampah di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan mencapai mencapai 1.840,70 ton per hari sampai 1.897,52 ton per hari dari kurun tahun 2015-2021. Hal tersebut akan semakin meningkat berdasarkan Prediksi timbulan sampah.

**Tabel 1. 1 Prediksi Jumlah Timbulan Sampah berdasarkan Penduduk**

Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/hari)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (kg/tahun)	Timbulan Sampah (ton/tahun)
2022	3.214,791	2.411	2,41	880.049	880,05
2023	3.272,657	2.454	2,45	895.890	895,89
2024	3.331,565	2.499	2,50	912.016	912,02
2025	3.391,533	2.544	2,54	928.432	928,43
2026	3.452,581	2.589	2,59	945.144	945,14
2027	3.514,727	2.636	2,64	962.157	962,16
2028	3.577,992	2.683	2,68	979.475	979,48
2029	3.642,396	2.732	2,73	997.106	997,11
2030	3.707,959	2.781	2,78	1.015.054	1.015,05

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Analisis, 2023

Di lain sisi, kapasitas pengangkutan saat ini hanya mencapai 800 ton dari total 2.400 ton sampah yang dihasilkan perhari (perpustakaan menlhk, 2022). Sedangkan tingginya timbulan sampah pada TPA yang semakin meninggi akan berpotensi mengakibatkan longsor jika sampah terus di buang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah 3R sebagai upaya dalam mengurangi sampah saat ini pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal. Dimana setelah melakukan serah terima kepada

Masyarakat pengelola tidak adanya pengarahan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan berakibat pada tidak berjalannya pengelolaan sampah. Masyarakat belum memiliki pengetahuan lebih akan pentingnya pengelolaan sampah, masyarakat juga mengalami keterbatasan dalam melakukan pemasaran hasil produk pengelolaan sampah seperti sabun hasil *Eco-Enzyme*, pupuk, hasil budidaya maggot dan kerajinan hasil produk sampah Daur ulang seperti tas, dompet dll. Dimana hasil produk tersebut biasanya hanya di simpan ataupun hanya dimanfaatkan kembali oleh pengelola tanpa adanya penjualan. Hal tersebut berakibat pada tidak berkelanjutan nya pengelolaan dana awal yang telah diberikan. Selain itu, tidak semua Tempat pengelolaan sampah 3R memiliki pengelola yang jelas dan khusus untuk pengelola sampah, biasanya serah terima hanya dilakukan kepada Kelompok masyarakat yang berada di bawah kelompok tertentu. Sehingga, pengelolaan sampah 3R tidak menjadi fokus utama lagi setelahnya. Dari uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik Pengelolaan sampah 3R di wilayah berdasarkan Kategori Maju, berkembang dan Tidak berkembang di Kabupaten Bekasi?
2. Apa saja faktor penghambat pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi?
3. Apa saja peran dan kontribusi setiap *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimana bentuk keterlibatan Aktor *Helix* dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi?
5. Bagaimana pengaruh peran *Stakeholder* terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran *Stakeholder* dalam pengelolaan 3R sebagai upaya menciptakan pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

#### **1.3.2 Sasaran**

Adapun sasaran dari penelitian ini menjawab tujuan penelitian meliputi:

1. Teridentifikasinya Karakteristik Pengelolaan sampah di wilayah berdasarkan Kategori Maju, berkembang dan tidak berkembang.

2. Teridentifikasinya faktor penghambat pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi.
3. Teridentifikasinya peran dan kontribusi setiap *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi.
4. Teridentifikasinya bentuk keterlibatan Aktor *Helix* dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi.
5. Teridentifikasinya pengaruh peran *Stakeholder* terhadap pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti secara pribadi, bidang akademisi dalam pengembangan Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota maupun untuk *Stakeholder* dalam Pengelolaan Sampah 3R di Kabupaten Bekasi.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan Disiplin ilmu, khususnya di bidang ilmu Perencanaan Wilayah da Kota, dan permasalahan terkait pengelolaan sampah pada setiap lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait perencanaan dan pengelolaan sampah serta memperdalam peran *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah 3R.
- b. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam Tempat Pengelolaan Sampah berbasis 3R dengan melibatkan Peran *Stakeholder* dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah 3R

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti diharapkan dengan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam hal referensi pemikiran dan pengalaman yang telah dikaji selama proses penelitian.
- b. Bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, diharapkan penelitian dapat menjadikan bahan referensi yang dapat membantu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik dan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap permasalahan lingkungan akibat sampah, dan pengelolaan sampah pada tempat pengelolaan sampah 3R.

- c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas terkait dengan pengelolaan sampah di harapkan dapat menjadikan referensi dan menjadi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan persampahan dalam pengambilan kebijakan lanjutan pengelolaan sampah yang saat ini belum secara maksimal membantu mengatasi permasalahan persampahan. Selain itu, penelitian ini di harapkan mampu memberikan referensi untuk Pemerintah terkait lainnya terkait dengan pentingnya peran *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

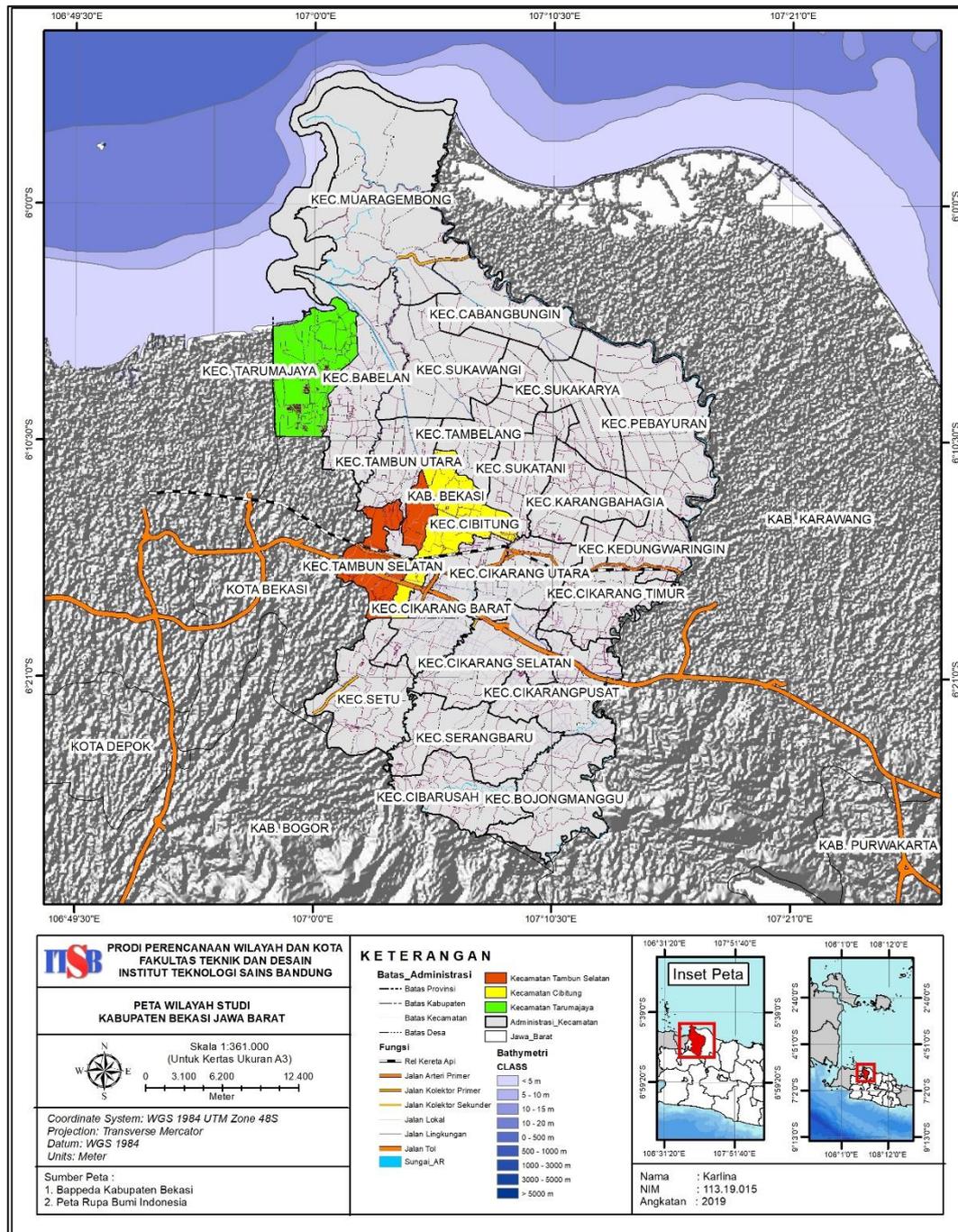
Ruang lingkup penelitian terbagi menjadi dua bagian, meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah merupakan batasan wilayah secara geografis dalam penelitian, sedangkan ruang lingkup materi merupakan batasan pembahasan materi yang akan di bahas dalam penelitian ini.

### **1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang Lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bekasi dengan dilakukannya pengambilan *sample* penelitian pada 3 (tiga) TPS 3R di 3 (tiga) Kecamatan berdasarkan kategori Maju, berkembang, dan tidak berkembang yang di peroleh berdasarkan Pembobotan Data hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) TPS 3R 2023 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 Kecamatan dengan total luas 1.273,88 Ha, dengan 3 (tiga) Kecamatan yang kemudian dijadikan *sample* TPS 3R berdasarkan Kategori Maju berada Kecamatan Tambun Selatan dengan karakteristik perkotaan dengan total luas mencapai 3.711,49 Ha, sedangkan Kategori berkembang berada pada Kecamatan Cibitung dengan karakteristik Campuran (Desa-Kota) dengan total luas mencapai 35.79 km<sup>2</sup>, dan Kategori tidak berkembang berada pada Kecamatan Tarumajaya dengan karakteristik pesisir dengan total luas mencapai 4.412 Ha. Adapun secara administrasi batas Kabupaten Bekasi, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

Gambar 1. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bekasi



Sumber: Analisis ArcMap, 2023

### 1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah mengkaji terkait dengan Peran *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah 3R. Dalam proses pengkajian terkait peran *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah 3R, maka dilakukannya identifikasi pengelolaan sampah pada wilayah eksisting berdasarkan data Monev TPS 3R oleh Bappeda tahun 2023 yang dijadikan *sample* penelitian pengelolaan sampah 3R berdasarkan kategori maju di Kecamatan Tambun selatan, kategori berkembang di Kecamatan Cibitung, dan kategori tidak berkembang di Kecamatan Tarumajaya. Kemudian dilakukan identifikasi faktor penghambat berdasarkan Mekanisme pengelolaan sampah berkelanjutan atau *Integrated Solid Waste Management* (ISWM). Setelah itu dilakukan identifikasi terkait dengan peran dan kontribusi setiap *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah 3R, dan memetakan *Stakeholder* berdasarkan peran dan pengaruh untuk melihat keterlibatan *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah 3R di wilayah *sample* penelitian sebagai upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan fokus dan batasan ruang lingkup materi penelitian:

- Fokus penelitian pertama terkait dengan peran *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi. Identifikasi peran *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah 3R meliputi *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah 3R dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, meliputi pengelolaan sampah 3R oleh TPS 3R dan Bank Sampah Unit. Pemilihan *sample* penelitian berdasarkan data hasil *Monitoring* dan Evaluasi TPS 3R oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2023 yang dilakukan pembobotan berdasarkan indikator standar, aktivitas dan saran yang di adaptasi dari aturan standar Jurnal Teknis TPS 3R, teori dan *Benchmarking* yang di sintesis. Kemudian dilakukan pembobotan TPS 3R dan di peroleh 3 (tiga) *sample* TPS 3R yang dikategorikan menjadi TPS 3R dengan kategori maju di Kecamatan Tambun Selatan, TPS 3R dengan kategori berkembang di Kecamatan Cibitung, dan TPS 3R dengan kategori tidak berkembang di Kecamatan Tarumajaya. Setelah itu, dilakukan pemilihan Bank Sampah Unit pada 3 (tiga) Kecamatan yang menjadi *sample* TPS 3R

berdasarkan hasil rekomendasi Ketua Forum Bank Sampah setiap Kecamatan yang mengacu pada indikator standar, aktivitas dan saran yang di adaptasi dari aturan standar Permen LHK No. 14 Tahun 2021 dan Permen LHK No 13 tahun 2012, teori, serta *Benchmarking*. Sehingga penelitian ini hanya berfokus pada *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah 3R di wilayah *sample* dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

- Fokus penelitian kedua terkait dengan Faktor penghambat pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Identifikasi faktor penghambat pengelolaan sampah berdasarkan Mekanisme pengelolaan sampah berkelanjutan atau *Integrated Solid Waste Management (ISWM)* akan di fokuskan pada faktor penghambat berdasarkan 6 (enam) aspek pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan meliputi identifikasi aspek penghambat pada aspek institusi, politik, lingkungan, teknik, finansial dan ekonomi, serta sosial dan budaya. Analisis ini digunakan untuk menjadi dasar pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan oleh setiap *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah 3R sebagai upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.
- Fokus penelitian ketiga terkait dengan *Stakeholder* yang berperan dan berkontribusi dalam pengelolaan sampah 3R. *Stakeholder* yang dimaksud meliputi Pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Bupati No 53 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, serta bentuk keterlibatan aktor *Helix* atau aktor multi-pihak yang dapat membantu dalam memaksimalkan kinerja pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan. Identifikasi peran dan Kontribusi *Stakeholder* berfokus untuk melihat keterlibatan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi berdasarkan perannya di kondisi eksisting dan kewajiban yang diadaptasi berdasarkan teori atau aturan yang berlaku dalam pengelolaan sampah 3R, serta hambatan setiap *Stakeholder* dalam melakukan perannya dalam pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan.
- Fokus penelitian terakhir berkaitan dengan pemetaan *Stakeholder* yang berperan dan berkontribusi dalam pengelolaan sampah 3R. Fokus pemetaan *Stakeholder* memuat 3 (tiga) Teori pemetaan *Stakeholder* yang dianggap

mewakili setiap analisis *Stakeholder* meliputi Pemetaan klasifikasi Saliience Model oleh *Mitchell et all* (1997), pemetaan berdasarkan sikap dan pengetahuan oleh Turner (2008), dan pemetaan berdasarkan Kepentingan dan kekuasaan oleh Brysson (2003). Setelah itu dilakukan perbandingan berdasarkan peran dan Kontribusi *Stakeholder* yang telah di petakan berdasarkan wilayah *sample* penelitian untuk melihat pengaruh peran *Stakeholder* di setiap wilayah *sample* berdasarkan Kategori sebagai upaya memaksimalkan kinerja pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari dari 6 (enam) bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan teori, metodologi penelitian, gambaran umum, analisis dan kesimpulan dan rekomendasi. Berikut uraian sistematika penulisan setiap bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama dijelaskan terkait dengan Latar Belakang studi, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TEORI**

Pada bab kedua dijelaskan Tinjauan teoritis mengenai berbagai aspek yang melandasi analisis dan kajian pada bab selanjutnya berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ketiga dijelaskan terkait dengan metode yang digunakan dalam laporan penelitian. Adapun isi dari Metode penelitian meliputi metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel dan metode analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Pada bab keempat membahas kondisi wilayah studi yaitu Kabupaten Bekasi terdiri dari kondisi fisik lingkungan, kependudukan, sosial Ekonomi, dan gambaran umum kondisi eksisting terkait dengan topik penelitian studi.

#### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab kelima merupakan inti dari studi yang membahas mengenai identifikasi Peran *Stakeholder* dalam pengelolaan Sampah 3R meliputi bagaimana Karakteristik Pengelolaan sampah berdasarkan Kategori Maju, berkembang dan Tidak berkembang di Kabupaten Bekasi ; Apa saja Faktor penghambat pengelolaan 3R di Kabupaten Bekasi ; Apa saja peran dan kontribusi setiap *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi ; Bagaimana keterlibatan Aktor *Helix* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi ; Bagaimana pengaruh peran *Stakeholder* terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi.

#### **BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab keenam merupakan penutup dalam laporan penelitian ini yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Serta diberikan rekomendasi penulis mengenai pokok bahasan yang telah dilakukan.